

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Bachsan Mustafa. (1984). *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Remadja Karya.
- Hans Kelsen. (2008). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Lawrence M. Friedman. (2001). *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1986). *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Rusadi Kantaprawira. (1988). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Salim, H. . (2012). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sri Soemantri. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sudjana, N. (2014). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, ade maman. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafiie, I. K. (2003). *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. Karya Ilmiah/Jurnal.

- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Arena Hukum*.
- Diba, C. F. (2022). *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak UPTD Aceh*.
- Fardian, A., & Indonesia, C. (2020). *PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DI INDONESIA DALAM Universitas Gadjah Mada Bulaksumur , Caturtunggal , Kec . Depok , Kabupaten Sleman , Yogyakarta 55281 Abstrak A . Pendahuluan Dewasa ini human trafficking adalah s. 2, 40–55*
- Manihuruk, T. N. S., & Rochaeti, N. (2016). Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Polrestabes Semarang.
- Putu, N., Yuliantini, R., Dewa, G., Mangku, S., Pipit, P., & Putri, P. E. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali.
- Rahman, N. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual Di Cirebon.
- Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudiby, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial.
- Safaruddin Harahap, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif.
- Seksual, K. K., Ayu, I. G., Sri, K., & Ariawan, I. G. K. (n.d.). *memenuhi hak – hak anak . Salah satu permasalahan yang sampai kejahatan terhadap anak . Berbagai kasus kejahatan terhadap sebagai sebuah satu kesatuan yang dipimpin oleh seorang kepala wadah. 1–13.*

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5602)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606).

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6792).

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 9).

Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 55 Tahun 2015 tentang Koordinasi Pelayanan Terpadu Atas Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 55).

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 20).

D. Internet.

<https://zonasultra.id/pemkot-kendari-dan-rps-susun-sop-uptd-perlindungan-perempuan-dan-anak.html>.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa>.

https://dispppa.kendarikota.go.id/Pages/struktur_organisasi.

<https://adjar.grid.id/amp/542980859/faktor-faktor-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia>.